

## **BAB III**

### **KEPEMIMPINAN POL POT DI KAMBOJA**

#### **A. Kebijakan-Kebijakan pada Masa Pemerintahan Pol Pot**

Pol Pot sebagai pemimpin Kamboja yang baru merubah semua kebijakan yang telah ada sebelumnya. Ia menerapkan kebijakan sesuai dengan cita-cita revolusi yang telah ia rumuskan selama ini. Rezim Pol Pot terkenal sebagai rezim yang kaku, keras, brutal, dan banyak memusuhi rakyatnya sendiri.<sup>1</sup> Untuk merealisasikan impian tersebut Pol Pot melaksanakan beberapa kebijakan bagi rakyat Kamboja. Kebijakan-kebijakan itu antara lain:

##### **1. Bidang Sosial**

Kebijakan dalam bidang sosial yang dilaksanakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja antara lain:

###### **a. Evakuasi penduduk kota ke pedesaan**

Sejak Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah seluruh penduduk diminta untuk meninggalkan kota (gambar penduduk Kamboja secara berbondong-bondong meninggalkan kota lihat lampiran 9 dan 10 halaman 99-100). Alasan utama untuk keselamatan, namun hal itu memang telah direncanakan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Mereka dikirim ke pedesaan di mana pusat pertanian dilaksanakan. Para serdadu Khmer Merah mengirim penduduk ke

---

<sup>1</sup> Sardiman A. M., *Analisis Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 67.

pedalaman dan *Angka* akan menyediakan semua kebutuhan penduduk.<sup>2</sup> Khmer Merah berjanji bahwa segala keperluan penduduk akan diberikan dan dipenuhi di tempat yang baru.

Pemindahan penduduk kota ke pedesaan atau pedalaman merupakan bagian dari revolusi yang dilaksanakan Pol Pot. Pol Pot ingin mengubah Kamboja menjadi negara agraris dengan mempekerjakan semua penduduk sebagai petani dari berbagai golongan.<sup>3</sup> Dengan mempekerjakan seluruh penduduk sebagai petani diharapkan kebutuhan pangan dapat terpenuhi sehingga Kamboja tidak perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Evakuasi itu juga diharapkan mampu memecah stratifikasi sosial yang mengakar dan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas di Kamboja.<sup>4</sup>

Evakuasi dari kota ke pedesaan yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung menghapus kota yang telah ada. Pemerintah tidak menghendaki adanya perkembangan di daerah perkotaan. Bahkan dalam propaganda mereka, pemerintah menyebut Phnom Penh sebagai *the great prostitute on Mekong*.<sup>5</sup> Sehingga semua kota-kota yang ada di Kamboja dikosongkan kecuali beberapa

<sup>2</sup> Haing Ngor and Roger Warner, *A Cambodian Adyssey*, a. b., M. Syafi'i Anwar, *Neraka Kamboja: Awal Mula, Buku Kesatu*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 204.

<sup>3</sup> Allen and Unwin, *Focus on Southeast Asia*, (Singapore: KHL Printing Co Pte Ltd, 1995 ), hlm. 26.

<sup>4</sup> David Chandler, *A History of Cambodia*, (Chiang Mai: Silkworm Books, 1998), hlm. 210.

<sup>5</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia Kamboja*, (Jakarta: Metro Pos, 2002), hlm. 75.

anggota Khmer Merah yang tinggal di daerah itu untuk kepentingan pemerintahan.

Untuk memudahkan pemindahan penduduk, pemerintah membagi Kamboja menjadi beberapa wilayah administrasi. Pembagian wilayah administrasi Kamboja disesuaikan dengan arah mata angin seperti timur, utara, barat, dan sebagainya (peta pembagian wilayah administrasi Kamboja lihat lampiran 3 halaman 93).<sup>6</sup> Itu dilakukan pemerintah untuk memudahkan pemindahan penduduk dan pengelolaan lahan pertanian yang harus dikerjakan.

### **b. Penghapusan Pendidikan**

Untuk melanggengkan pemerintahan, rezim Pol Pot juga meniadakan pendidikan formal. Penduduk Kamboja tidak boleh mendapatkan pendidikan kecuali untuk kebutuhan propaganda.<sup>7</sup> Jangankan menempuh pendidikan, buku juga tidak boleh beredar di masyarakat. Penghapusa dilakukan agar masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang dapat membuat mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pelarangan pendidikan formal lazim dilakukan oleh penjajah didaerah jajahannya. Agar mereka tetap patuh dan tunduk terhadap pemerintahan yang berlaku.

Pemerintah mengadakan pendidikan bagi anak-anak yang belum dewasa. Mereka memberikan pendidikan agar mereka mau mengabdi kepada *Angka*. Dalam pendidikan itu mereka diberitahu bahwa *Angka* akan memberikan

<sup>6</sup> Francois Ponchaud, *Cambodia: Year Zero*. (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1998), hlm. 91.

<sup>7</sup> Allen and Unwin, *loc.cit.*,

kebahagian dan kesejahteraan bagi rakyat Kamboja. Mereka dididik untuk melupakan keluarga mereka sehingga hidup mereka hanya didedikasikan untuk *Angka*. Setelah hal itu berhasil, mereka akan dijadikan tentara untuk mengawasi para pekerja.

### c. Penghapusan Agama

Komunis merupakan ideologi yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Hal itu juga yang diberlakukan di Kamboja saat Pol Pot berkuasa. Pol Pot melarang agama dan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang ada di Kamboja.<sup>8</sup> Bhiksuhiksu yang tadinya sangat dihormati oleh masyarakat Kamboja dan memiliki kedudukan penting dalam upacara keagamaan dijadikan masyarakat biasa. Mereka juga harus bekerja seperti penduduk lainnya.

Masyarakat Kamboja merupakan masyarakat yang menganut agama Budha. Seperti yang kita tahu bahwa agama Budha sarat akan upacara adat dalam kehidupan sehari-harinya. Pada masa pemerintahan Pol Pot segala bentuk upacara keagamaan dihapuskan. Masyarakat tidak boleh memeluk agama apapun, hal itu merupakan bagian dari revolusi yang telah direncanakan. Sehingga pada masa ini agama di Kamboja tidak mengalami perkembangan bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan keagamaan mengalami kemunduran.

## 2. Bidang Ekonomi

Rezim Pol Pot merubah tatanan perekonomian di Kamboja seperti zaman pra modern. Pol Pot melakukan kebijakan yang membuat rakyatnya menderita

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan banyak yang tewas akibat kebijakan yang tidak masuk akal itu. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

**a. Menciptakan masyarakat tanpa uang**

Sejalan dengan kebijakan evakuasi penduduk kota ke pedesaan dan isolasi bagi dunia luar. Rezim Pol Pot mengeluarkan kebijakan masyarakat tanpa uang. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan penghapusan terhadap pasar, perdagangan swasta, kepemilikan pribadi, dan pelayanan publik.<sup>9</sup> Penghapusan mata uang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita revolusi yang digagas oleh Pol Pot. Ia ingin membangun negara tanpa kelas sesuai tujuan ideologi komunis.

Adanya uang, pasar, dan kepemilikan pribadi akan membuat masyarakat memiliki orientasi mengumpulkan harta. Sehingga jika mereka bekerja hanya bertujuan mencari uang. Pemerintah beranggapan bahwa uang akan menyebabkan kekacauan.<sup>10</sup> Dengan uang setiap manusia dapat memenuhi keinginan mereka, uang akan menciptakan kelas sosial dimana akan ada kelas pekerja dan majikan.

---

<sup>9</sup> Alfred Suci, *151 Konspirasi Dunia Paling Gila dan Mencengangkan!*, (Jakarta: Wahyumedia, 2011), hlm. 127-128.

<sup>10</sup> Uang merupakan alat pembayaran yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan sejak zaman dahulu manusia telah mengenal uang dan berkembang hingga saat ini. Namun karena uang banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Hal itu dapat dilihat dari keinginan setiap orang untuk mengumpulkan harta. Hal itu juga terjadi pada masa Sihanouk dan Lon Nol, banyak pejabat yang melakukan korupsi hal itu ingin dihilangkan oleh rezim Pol Pot. Tidak jauh berbeda dengan kasus korupsi yang membekunya Indonesia hingga saat ini. Lihat Bibit Samad Rianto, *Korupsi Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2009). Lihat juga Onghokham, “Tradisi dan Korupsi”, dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1983 Tahun XII, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 3-13.

Untuk menghilangkan semua itu, pemerintah melakukan penghapusan terhadap mata uang.

### **b. Melakukan kerja paksa**

Kerja Paksa biasanya terjadi ketika suatu negara dikuasai oleh negara lain atau terjajah.<sup>11</sup> Keadaan itu tidak berlaku untuk negara Kamboja. Di bawah pemerintahan anak negeri sendiri, Kamboja mengalami masa kelam yang tidak dapat terlupakan. Masyarakat Kamboja harus mengalami kerja paksa untuk dapat bertahan hidup. Seluruh penduduk diwajibkan melakukan kerja paksa di pedesaan. Mereka bekerja untuk menggarap sawah, menggali saluran air, membuat bendungan, dan melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian.<sup>12</sup> Pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki yang selalu dalam pengawasan serdadu Khmer Merah.

Penduduk sangat menderita dengan sistem ini, bagaimana tidak mereka diharuskan bekerja selama empat belas jam sehari, dua puluh tujuh hari dalam sebulan.<sup>13</sup> Mereka tidak mendapatkan upah dalam pekerjaan ini karena adanya sistem penghapusan mata uang yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai imbalan

<sup>11</sup> Penjajahan pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan tersebut masyarakat Indonesia mengalami kerja paksa baik pada masa Belanda (disebut kerja rodi) maupun Jepang (disebut romusha). Masyarakat juga dipaksa menanam tanaman tertentu untuk Belanda. Lihat Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, a. b., Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 183-184.

<sup>12</sup> David Chandler, dkk, *The Emergence of Modern Southeast Asia A New History*, (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 483.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

dari pekerjaan itu, mereka hanya mendapatkan jatah makan, tempat tinggal, dan pakaian seadanya.

Kerja paksa yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri ternyata sebaliknya. Kamboja tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri. Kecuali beberapa daerah yang memiliki tanah yang subur, tenaga kerja yang berpengalaman, dan ketersediaan air yang memadai. Akibat kurangnya pasokan makanan banyak pekerja yang kelaparan, karena mereka hanya mendapatkan jatah makan berupa air tajin.<sup>14</sup> Makanan itu tidak dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh manusia. Apalagi mereka diharuskan bekerja keras untuk menggarap lahan pertanian. Wajar jika banyak penduduk yang tewas akibat kekurangan makanan.

### **3. Bidang Politik**

Pol Pot sebagai pemimpin baru Kamboja menerapkan kebijakan di bidang politik yang dapat melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan itu antara lain:

#### **a. Melakukan pembunuhan massal atau *genocide***

Kebijakan yang membuat Kamboja terkenal dan menjadi masalah internasional adalah pembunuhan massal yang dilakukan rezim Pol Pot. Dibuktikan dengan ditemukannya lebih kurang 343 ladang pembantaian.<sup>15</sup> Banyak ditemukan tulang belulang manusia yang tewas akibat kekejaman rezim Pol Pot di ladang-ladang tersebut (gambar tulang belulang dan tengkorak korban

---

<sup>14</sup> Haing Ngor and Roger Warner, *A Cambodian Adyssey*, a. b., Agus Setiadi, *Neraka Kamboja: Siksa dan Derita, Buku kedua* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 211.

<sup>15</sup> Alfred Suci, *op.cit.*, hlm. 128.

kekejaman Pol Pot lihat lampiran 11-12 halaman 101-102 dan foto para korban lihat lampiran 14 halaman 104). Pembunuhan itu dilaksanakan setelah rezim ini berkuasa di Kamboja pada 17 April 1975. Sejak saat itu penduduk Kamboja banyak yang menghilang tanpa ada penjelasan dari pemerintah.

Pembunuhan massal dimulai ketika Phnom Penh jatuh ke tangan pasukan Khmer Merah. Mereka menembak semua tentara yang berseragam pasukan Lon Nol. Rezim Pol Pot melakukan pembunuhan tanpa proses peradilan, tidak peduli mereka bersalah atau tidak semua orang yang berhubungan dengan rezim Lon Nol akan disingkirkan. Ini merupakan program dari revolusi untuk menghilangkan kekuatan yang telah ada sebelumnya.

Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa jumlah penduduk yang tewas akibat pembunuhan itu. Banyak orang yang memperkirakan antara 1,7 juta sampai 2 juta orang tewas dalam kurun waktu 1975-1979.<sup>16</sup> Pol Pot sendiri tidak dapat memastikan berapa banyak orang yang tewas saat ia memerintah Kamboja.<sup>17</sup> Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, jutaan penduduk tewas saat Pol Pot memerintah Kamboja. Tempat-tempat yang disinyalir dijadikan ladang

<sup>16</sup> Banyak buku maupun surat kabar yang merilis jumlah penduduk Kamboja yang tewas akibat pembunuhan massal yang dilakukan rezim Pol Pot. Antara lain Lihat Serge Thion, *Genocide as a Political Commodity*, in Ben Kiernan, *Genocide and Democracy in Cambodia: The Khmer Rouge, the United Nations and the International Community*, (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1993), hlm. 165. Jumlah korban tewas juga ditulis dalam buku David Chandler, dkk, *loc.cit.*, Seth Mydans, *Ex Khmer Rouge Leader Blames U.S.*, dapat dilihat di <http://www.nytimes.com>, diakses pada Selasa 15 Januari 2013, pukul 21.00 WIB.

<sup>17</sup> Syamdani, *Kisah Diktator-Diktator Psikopat*, (Yogyakarta: Narasi, 2009), hlm. 178.

pembantaian pada saat itu, dijadikan museum untuk mengenang para korban (gambar ladang pembantaian lihat lampiran 13 dan 15 halaman 103 dan 105).<sup>18</sup>

Ada tiga faktor penyebab tewasnya jutaan penduduk Kamboja, pertama pembunuhan terhadap bekas pendukung Lon Nol, kedua pembersihan partai, dan yang ketiga pembunuhan terhadap orang-orang yang disinyalir tidak mendukung pemerintahan Pol Pot.<sup>19</sup> Pemerintah melakukan program itu untuk tetap melanggengkan kekuasaan dan memaksa penduduk untuk tetap tunduk dan patuh. Mereka akan takut karena Khmer Merah tidak akan segan untuk melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dianggap bersalah.

Hilangnya jutaan nyawa di Kamboja telah direncanakan sejak awal. Program utama dari pembunuhan massal itu ditujukan kepada para mantan pejabat Lon Nol, dokter, dosen, guru, dan semua intelektual yang ada di Kamboja. Mereka yang berasal dari golongan intelektual akan diinterogasi di daerah dengan sebutan S-21 (gambar ruang penyiksaan lihat lampiran 16 halaman 106).<sup>20</sup> Mereka dipaksa untuk mengakui profesi mereka masing-masing, jika tidak ada yang mau bicara para serdadu akan semakin menyiksa mereka. Mereka disiksa dengan cara diikatkan pada sebuah salib sehingga tubuh mereka tergantung dan dibawah mereka asap dan nyala api menjilat-jilat tumpukan sekam dan kayu yang

---

<sup>18</sup> Agence France, *Ex-King Urges Cremation of Khmer Rouge Victims*, dapat dilihat di <http://www.nytimes.com>, diakses pada hari Selasa 15 Januari 2013, pukul 21.30 WIB.

<sup>19</sup> Serge Thion, *Genocide as a Political Commodity*, in Ben Kiernan, *The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79*, (Thailand: Silkworm Books, 1997), hlm. 166.

<sup>20</sup> David Chandler, dkk, hlm.484.

terbakar di sekeliling kaki orang yang dihukum.<sup>21</sup> Banyak yang tidak mampu bertahan hidup ketika mereka memasuki S-21.

Tewasnya jutaan penduduk Kamboja tidak hanya karena penyiksaan namun pemindahan penduduk dari kota ke pedesaan dan tanam paksa yang dicanangkan rezim Pol Pot. Penduduk kota yang tidak mengerti tentang pertanian, dipaksa mengolah tanah, menanam padi, menggali saluran air dan pekerjaan lainnya yang tidak pernah mereka kerjakan. Akibatnya banyak dari mereka yang tewas karena kekurangan gizi dan kelelahan.<sup>22</sup> Selain itu, banyak penduduk yang tewas karena penyakit yang tidak mendapatkan perawatan medis.

Para pekerja tidak mendapatkan makanan yang memadai dan istirahat yang cukup karena mereka harus bekerja sepanjang waktu untuk mengolah lahan pertanian. Mereka selalu dalam penjagaan serdadu Khmer Merah sehingga hanya dapat melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Kekejaman serdadu Khmer Merah sangat kontras dengan ikrar setia yang selalu mereka ucapkan setiap pagi, yaitu:

- 1) Cintai dan hormatilah kaum pekerja dan petani, serta berbaktilah kepada mereka;
- 2) Berbaktilah kepada rakyat ke manapun kita pergi dengan sepenuh hati dan pikiran;
- 3) Hargailah rakyat tanpa merugikan kepentingan mereka, tanpa menyentuh barang-barang atau tanaman mereka, dan jangan mencuri bahkan sebutir

---

<sup>21</sup> Haing Ngor and Roger Warner, *Buku Kedua*, *op.cit.*, hlm. 198.

<sup>22</sup> David Chandler, dkk, *op.cit.*, hlm. 483.

merica pun, dan jaga diri jangan sampai terlontar sepatah kata pun yang bernada kasar terhadap mereka;

- 4) Minta maaflah jika melakukan kekeliruan. Jika ada kepentingan rakyat yang dilanggar, maka kerugian yang terjadi harus diganti;
- 5) Dst.<sup>23</sup>

Ikrar yang selalu mereka ucapkan sebelum beraktifitas berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Para serdadu bertindak sangat kasar dan tidak mempedulikan nasib para pekerjaan. Mereka hanya menghendaki para pekerja bekerja sesuai dengan arahan mereka dan pekerjaan selesai tepat pada waktunya sehingga tujuan revolusi dapat tercapai.

#### **b. Kamboja tertutup bagi dunia luar**

Kamboja jatuh ke tangan pemerintahan Pol Pot pada bulan April 1975. Pol Pot melakukan berbagai kebijakan yang sangat mengejutkan, baik bagi Kamboja sendiri maupun dunia internasional. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Pol Pot menganut ideologi komunis, ia melakukan revolusi secara radikal dan berbeda dengan revolusi yang terjadi di zaman modern sebelumnya.<sup>24</sup> Salah satu kebijakannya adalah menutup Kamboja bagi dunia luar. Pol Pot tidak menghendaki hubungan dengan dunia internasional kecuali beberapa negara yang menjadi sekutunya.

---

<sup>23</sup> Haing Ngor and Roger Warner, *Buku Kedua, op.cit.*, hlm. 241-242.

<sup>24</sup> Michael Vickery, “*Cambodia*”, in Douglas Allen and Ngo Vinh Long, *Coming to Term; Indochina, the United States and the War*, (United Kingdom: Westview Press, 1991), hlm. 96.

Kebijakan itu direalisasikan dengan melakukan deportasi terhadap seluruh warga negara asing yang berada di Kamboja. Tidak menunggu lama, setelah Kamboja jatuh ke tangan rezim Pol Pot, seluruh warga negara asing dipulangkan ke negaranya masing-masing. Hal ini untuk mendukung kebijakan isolasi yang dilakukan rezim Pol Pot, hampir tidak ada hubungan diplomatik yang dilakukan Kamboja dengan negara lain.<sup>25</sup> Pemerintahan Pol Pot memutus hampir semua hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia kecuali negara-negara yang berhaluan komunis.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada pemerintahan Pol Pot membuat rakyat menderita. Kebijakan itu tidak terlepas dari paham komunis yang dianut oleh rezim Pol Pot. Kebijakan yang radikal dan brutal itu membuat Kamboja menjadi sorotan dunia internasional. Akibat dari kebijakan-kebijakan brutal itu, membuat rakyat memiliki ketakutan yang tidak wajar sehingga menimbulkan trauma psikologi bagi mereka yang hidup pada masa pemerintahan Pol Pot.

## B. Dampak Kebijakan Pol Pot terhadap Kamboja

Pol Pot sebagai pemimpinan pasukan Khmer Merah mengubah ideologi yang semula berhaluan liberalisme menjadi komunisme.<sup>26</sup> Perubahan ideologi

<sup>25</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *op.cit.*, hlm. 78

<sup>26</sup> Kata komunisme memiliki arti suatu masyarakat di mana kekayaan atau kepemilikan berada di tangan masyarakat, setiap warga negara bekerja untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuannya dan mendapat balas jasa sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian komunisme mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sejak tahun 1917. Kata komunisme memiliki konteks yang sama dengan sosialisme ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memperkenalkan manifesto komunis mereka pada tahun 1848. Sejak saat itu ideologi ini memiliki

yang secara cepat dan radikal ini membuat masyarakat Kamboja menderita sepanjang pemerintahan Pol Pot. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sangat memberatkan rakyat dan tidak manusiawi. Akibat dari berbagai kebijakan Pol Pot, Kamboja mengalami semacam kemunduran di berbagai bidang kehidupan. Dampak dari pemerintahan yang radikal dan kejam itu antara lain:

### **1. Bidang Sosial**

Kerugian yang alami rakyat Kamboja saat Pol Pot memerintah di bidang sosial antara lain:

#### **a. Hilangnya fungsi dan peranan perkotaan**

Kebijakan evakuasi penduduk dari kota ke pedesaan membuat kota-kota di Kamboja menjadi kosong dan terbengkalai. Hal itu terjadi karena tidak ada penduduk yang diperbolehkan untuk tetap tinggal di daerah kota. Hanya beberapa serdadu Khmer Merah dan keluarganya yang tetap diizinkan tinggal di kota.<sup>27</sup> Tidak adanya penduduk atau masyarakat yang mendiami kota membuat segala aktifitas yang berada di perkotaan terhenti.

Kota merupakan tempat di mana kegiatan masyarakat berjalan dan berkembang. Dapat dikatakan segala kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi di daerah perkotaan baik kebutuhan yang sifatnya material maupun jasa. Karena kota merupakan kawasan pemusatan, pendistribusian pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Namun pemerintahan Pol Pot malah

---

banyak pengikut di seluruh dunia tak terkecuali Kamboja, Pol Pot menganut ideologi komunis yang sudah dikembangkan oleh Mao Zedong dengan pelaksanaan yang brutal dan kejam. Lihat M. A. Riff, *Dictionary of Modern Political Ideologies*, (New York: St. Martin's Press, 1987), hlm. 45 dan 65.

<sup>27</sup> David Chandler, *op.cit.*, hlm. 210.

menghapus kota karena kehidupan kota dianggap sebagai penghambat revolusi. Kota-kota dianggap sebagai tempat kaum penindas yang suka memeras, korup, dan merupakan tempat di mana kapitalis asing berkembang pesat.

Pemerintahan Pol Pot menjadikan kota sebagai tempat tinggal para pemimpin pasukan Khmer Merah dan keluarganya. Hanya pejabat pemerintah yang diperbolehkan tinggal di daerah perkotaan. Selain pejabat Khmer Merah, yang tetap diizinkan tinggal di daerah perkotaan adalah para buruh pabrik. Mereka dijadikan penasehat-penasehat teknis dan bekerja di pabrik-pabrik milik pemerintah.<sup>28</sup> Pol Pot beranggapan kebijakan pengosongan kota merupakan salah satu cara yang ikut menentukan keberhasilan revolusi yang telah dicita-citakan. Kota tidak memiliki banyak peran dan kegunaan pada masa pemerintahan Pol Pot, hanya sebatas pusat pemerintahan dan tempat bermukimnya para pekerja pabrik yang dibutuhkan untuk menopang perekonomian selain pertanian.

### **b. Hilangnya kegiatan pendidikan dan keagamaan**

Kebijakan-kebijakan yang dijalankan semasa Pol Pot berkuasa sangat merugikan rakyat Kamboja. Berbagai kebijakan tersebut membuat Kamboja seakan berada dalam kegelapan. Salah satu kebijakan itu adalah penghapusan pendidikan formal.<sup>29</sup> Pendidikan saat itu diadakan hanya untuk kegiatan propaganda. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan, dididik untuk setia pada *Angka* dan melupakan keluarga mereka. Mereka dijadikan pasukan Khmer Merah yang kejam dan tidak berperasaan (gambar pasukan muda Khmer Merah lihat

---

<sup>28</sup> Pabrik yang menopang perekonomian Kamboja pada saat itu antara lain pabrik tekstil, botol, gelas, semen, dan pengolahan karet.

<sup>29</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *op.cit.*, hlm. 77.

lampiran 8 halaman 98). Gedung sekolah beralih fungsi menjadi tempat pembantaian bagi orang-orang yang dianggap bersalah (gambar gedung sekolah yang sekarang jadi museum lihat lampiran 17 halaman 107).<sup>30</sup> Sekarang sekolah yang pernah digunakan sebagai penjara dan tempat pembantaian dijadikan museum untuk mengenang para korban rezim Pol Pot.

Tidak hanya kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan juga dihapuskan. Semua tempat ibadah seperti kuil dihancurkan, semua biksu dicopot dari kebiksuan dan dipaksa bekerja di lahan pertanian. Setiap penduduk tidak diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan maupun pemujaan. Itu terjadi karena hampir semua tempat untuk beribadah dihancurkan oleh pasukan Khmer Merah. Pemerintahan Pol Pot banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak azasi rakyat Kamboja. Kebijakan-kebijakan radikal yang pernah diberlakukan di Kamboja dikatagorikan sebagai kejahatan. Pol Pot bersama rekan-rekannya diajukan ke pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Salah satu sekolah yang digunakan adalah sekolah Ponhe Yat yang berdiri sejak tahun 1962 dan berganti nama menjadi Tuol Svay Prey High School sebelum dijadikan penjara dan tempat pembantaian oleh rezim Pol Pot. Tempat itu dikenal dengan nama Tuol Sleng atau S-21 yang secara harfiah berarti tempat menjaga mereka yang bersalah. Berdasarkan arsip Khmer Merah yang ditemukan, jumlah tahanan di Tuol Sleng sejak tahun 1975-1978 mencapai 10.449 tidak termasuk 2.000 anak. Lihat <http://rumahtulisan.wordpress.com/2004/08/30/cerita-tengkorak-dari-bukit-choeung-ek>, diakses pada hari Sabtu, 4 Mei 2013 pukul 13.30 WIB.

<sup>31</sup> [http://www.nytimes.com/2011/11/24/world/asia/ex-khmer-rouge-leader-blames-us.html?ref=norodomsihanouk&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/11/24/world/asia/ex-khmer-rouge-leader-blames-us.html?ref=norodomsihanouk&_r=0), diakses pada hari Selasa, 15 Januari 2013 pukul 21.00 WIB.

### **c. Hilangnya fasilitas umum dan kebebasan individu**

Semenjak Pol Pot memerintah Kamboja tidak hanya fasilitas pendidikan yang ditiadakan. Hampir seluruh fasilitas umum di Kamboja dihapuskan oleh rezim ini. Fasilitas umum yang ditiadakan antara lain penghapusan keberadaan rumah sakit, penghapusan jasa pos dan telepon, tidak ada media massa yang diizinkan beroperasi, dll. Kebijakan radikal tersebut membuat rakyat sangat menderita. Tidak ada pelayanan kesehatan untuk rakyat Kamboja, keadaan itu memaksa mereka untuk menggunakan ramuan tumbuh-tumbuhan dan obat tradisional.

Selain pelarangan terhadap fasilitas umum, rezim Pol Pot juga membatasi kebebasan setiap individu. Setiap masyarakat tidak diizinkan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka tidak diizinkan melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka diharuskan hidup dalam pertanian kolektif yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Dalam kehidupan tersebut pertemuan antara suami istri sangat dibatasi.<sup>32</sup> Rakyat Kamboja benar-benar kehilangan hak asasi mereka sebagai warga negara dan manusia yang merdeka.

### **d. Kamboja kehilangan penduduk satu hingga dua juta jiwa**

Pemerintahan Pol Pot membawa derita yang berkepanjangan bagi rakyat Kamboja. Berbagai kebijakan yang tidak masuk akal dan brutal membuat rakyat Kamboja kehilangan nyawa mereka. Tidak dapat dipastikan berapa jumlah rakyat Kamboja yang tewas akibat kebijakan tersebut. Banyak asumsi tentang tewasnya

---

<sup>32</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *loc.cit.*,

jutaan rakyat Kamboja, diantaranya pembunuhan massal yang dilakukan oleh rezim Pol Pot terhadap pengikut Lon Nol. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya ladang-ladang yang berisi jutaan tengkorak manusia dibeberapa daerah di Kamboja dan sekarang dijadikan museum oleh pemerintah.<sup>33</sup>

Hilangnya jutaan nyawa di Kamboja tidak terlepas dari berbagai kebijakan radikal yang dijalankan oleh rezim Pol Pot. Segala kebijakan yang diambil pemerintah membawa dampak buruk terhadap rakyat Kamboja. Data statistik demografi kamboja menyimpulkan jumlah korban hingga tahun 1979 diperkirakan antara 700.000 hingga 1 juta orang tewas, populasi penduduk Kamboja mengalami penurunan 400.000 orang.<sup>34</sup> Hilangnya penduduk Kamboja yang hampir mencapai dua juta jiwa itu termasuk mereka yang tidak diketahui keberadaannya.<sup>35</sup> Dapat dikatakan tewasnya jutaan rakyat Kamboja bukan hanya karena program pembunuhan massal yang dikeluarkan oleh Pol Pot.

Jumlah korban pembantaian pada masa pemerintahan Pol Pot tidak dapat diketahui dengan pasti. Banyak sumber menyebutkan 1,7 juta orang tewas selama Pol Pot memerintah, lebih kurang seperempat populasi penduduk Kamboja pada saat itu.<sup>36</sup> Salah satu desa di Kamboja yang memiliki penduduk 159 jiwa, pada tahun pertama Pol Pot memerintah kehilangan 50% penduduk karena kebijakan

<sup>33</sup> Syamdani, *op.cit.*, hlm. 178.

<sup>34</sup> Michael Vickery, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>35</sup> Serge Thion, *op.cit.*, hlm. 165.

<sup>36</sup> Art, *Korban: Nasib Kami Lebih Buruk dari Binatang*, <http://dunia.news.viva.co.id>, diakses pada hari Sabtu, 4 Mei 2013 pukul 13.30 WIB.

brutal yang diterapkan rezim ini.<sup>37</sup> Tewasnya penduduk tersebut bisa jadi karena program pembantaian yang diterapkan oleh rezim Pol Pot maupun sebab lain seperti kekurangan makanan, penyakit, dan beban kerja yang berlebihan. Data tersebut didukung dengan sisa-sisa tulang belulang dan tengkorak manusia yang ditemukan di berbagai tempat di Kamboja.

## 2. Bidang Ekonomi

Kebijakan penghapusan kota dan uang sebagai alat pembayaran membuat Kamboja berada dalam kondisi tanpa uang dan perdagangan. Sistem perekonomian yang selama ini berjalan menjadi terhenti. Terhentinya kegiatan ekonomi karena tidak adanya pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kegiatan bisnis yang dijalankan. Tidak ada kegiatan jual beli yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

Mundurnya sektor perekonomian membuat Kamboja mengalami kelangkaan bahan makanan dan bahan bakar.<sup>38</sup> Untuk itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengolah lahan pertanian bagi seluruh masyarakat. Tanpa mempedulikan latar belakang pendidikan maupun pekerjaan mereka. Masyarakat dituntut untuk mengerjakan lahan pertanian tanpa adanya sistem upah. Imbalan yang didapatkan berupa tempat tinggal, makan seadanya, dan pakaian serba

---

<sup>37</sup> May Ebihara, *A Cambodian Village under the Khmer Rouge 1975-1979*, in Ben Kiernan, *Genocide and Democracy in Cambodia: The Khmer Rouge, the United Nations, and the International Community*, (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1993), hlm. 58.

<sup>38</sup> A. R. Sutopo, “Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja: Menuju Hegemoni Kawasan?”, dalam *Analisa*, Tahun VII No. 2, Februari 1978, (Jakarta: CSIS, 1978), hlm. 94.

hitam.<sup>39</sup> Tidak hanya kegiatan perekonomian dalam negeri yang tidak berjalan, namun perdagangan luar negeri pun dihapuskan oleh pemerintahan Pol Pot.

Pol Pot menerapkan sistem kemandirian terhadap pemerintahannya yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh asing di Kamboja.<sup>40</sup> Untuk mewujudkan tujuan itu, basis pertanian yang kuat terus dibangun oleh rezim ini. Pertanian akan mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri yang akan melepaskan Kamboja dari bantuan asing. Khieu Samphan berpendapat Kamboja hanya bisa mencapai pembangunan ekonomi dengan meningkatkan dan memperluas produksi pertanian. Ternyata pendapat tersebut membuat perekonomian Kamboja mengalami kemunduran karena hanya bertumpu pada hasil pertanian yang tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

### **3. Bidang Politik dan Militer**

Kebijakan yang radikal dan brutal pada masa pemerintahan Pol Pot tidak hanya berdampak pada bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan itu juga berdampak dalam bidang politik dan militer, antara lain:

#### **a. Timbulnya pemberontakan**

Rezim Pol Pot yang kejam dan radikal menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Warga Kamboja yang menderita mulai ingin merasakan kebebasan. Banyak diantara mereka yang melarikan diri dan mencari perlindungan di Vietnam. Mereka yang mengungsi di Vietnam mendapatkan suaka politik dan

<sup>39</sup> Nazaruddin Nasution, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>40</sup> <http://www.countrystudies.us/cambodia/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2112, pukul 11.30 WIB.

Vietnam membantu mereka untuk membentuk pemerintahan di pengasingan agar melakukan pemberontakan.<sup>41</sup> Pemberian suaka tersebut memberikan jalan untuk menentang sikap dan tindakan pemerintahan Pol Pot yang kejam dan radikal.

Mereka yang berada di pengasingan akhirnya mendirikan suatu gerakan pembebasan yang disebut dengan Front Persatuan nasional Kamboja untuk Keselamatan Nasional.<sup>42</sup> Gerakan ini dipimpin oleh Heng Samrin dan didukung oleh pihak Vietnam. Dukungan Vietnam untuk gerakan ini berhasil merebut Phnom Penh dan menggulingkan rezim Pol Pot. Heng Samrin tampil sebagai pimpinan baru di Kamboja dan berharap dapat memberikan perubahan bagi rakyat Kamboja. Membebaskan Kamboja dari rezim Pol Pot yang kejam dan tidak mengenal belas kasih.

### **b. Embargo peralatan militer bagi Kamboja**

Ketertutupan Kamboja dari dunia luar membuat rezim Pol Pot dikucilkan dari dunia internasional. Keadaan itu tidak membuat Pol Pot khawatir untuk membangun negaranya yang berswasembada. Pol Pot beranggapan, negaranya mampu membuat peluru dan peralatan perang dari sisa-sisa pertempuran sebelumnya sehingga tidak membutuhkan bantuan dari negara lain. Cina yang selama ini menyediakan peralatan militer untuk Kamboja mulai membatasi bantuan yang diberikan.<sup>43</sup> Itu dilakukan Cina karena pemerintahan Pol Pot yang mulai tidak terarah dan tidak sejalan lagi dengan pemerintah Cina.

<sup>41</sup> David Candler, dkk, *op.cit.*, hlm. 485.

<sup>42</sup> Sardiman A. M., *op.cit.*, hlm. 69.

<sup>43</sup> David Candler, dkk, *op.cit.*, hlm. 485.

Kurangnya rasa tidak percaya pada pemerintahan Pol Pot membuat Cina mulai membatasi dalam memberikan bantuan baik ekonomi maupun militer. Keadaan itu membuat kondisi pemerintahan Pol Pot menjadi sulit. Ia tidak dapat memperoleh peralatan militer untuk memperkuat pertahanannya. Pol Pot juga tidak bisa mendapatkan bantuan peralatan atau membeli peralatan militer dari negara lain karena politik isolasi yang ia jalankan selama ini. Tidak ada negara lain yang ingin membantu menyediakan peralatan militer bagi pemerintahan Pol Pot yang kejam dan radikal.

#### **4. Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Kebijakan isolasi yang dilakukan Pol Pot berdampak pada bidang pertahanan dan keamanan negara Kamboja. Saat Kamboja terlibat konflik dengan Vietnam, Kamboja tidak mendapat bantuan keamanan dari negara-negara di dunia kecuali Cina. Tidak banyak yang tahu tentang kondisi dalam negeri Kamboja yang sesungguhnya saat Pol Pot memerintah. Keadaan tersebut yang menyebabkan negara lain tidak banyak memberikan simpati terhadap pemerintahan Pol Pot.

Keadaan itu tetap berlanjut hingga Pol Pot meninggalkan Kamboja pada awal tahun 1979. Kepergian Pol Pot dipicu oleh serangan Vietnam yang mampu menembus jantung pertahanan Phnom Penh. Meskipun Vietnam melakukan invasi terhadap Kamboja namun tidak ada negara lain yang memberikan bantuan keamanan terhadap Kamboja. Itu terjadi akibat kebijakan isolasi yang dilakukan oleh Pol Pot.

### C. Akhir Pemerintahan Pol Pot

Kamboja berada di bawah pemerintahan Pol Pot tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan Kamboja menjadi negara yang tertutup bagi dunia luar. Kebijakan itu menghambat perkembangan negara Kamboja secara keseluruhan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun bidang kehidupan yang lain. Pemerintahan Pol Pot yang diktator membuat rakyat ketakutan, hal itu dikarenakan kebijakan-kebijakan yang brutal dan penuh dengan teror.

Kebijakan yang dilaksanakan Pol Pot membuat rakyat menderita dan ketakutan. Meskipun seluruh penduduk diharuskan melakukan kerja paksa di bidang pertanian, namun Kamboja tetap kekurangan pangan. Kebijakan kerja paksa merupakan salah satu penyebab banyaknya penduduk yang tewas di ladang pertanian. Yang menyebabkan semakin berkurangnya penduduk Kamboja pada saat itu. Kebijakan isolasi membuat Kamboja tidak banyak mendapatkan bantuan ekonomi dari negara-negara lain.<sup>44</sup> Kegiatan perdagangan hanya dilakukan dengan beberapa negara seperti Cina, itu pun sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Kondisi dalam negeri Kamboja semakin tidak stabil ketika konflik-konflik perbatasan kembali bergejolak pada tahun 1977.<sup>45</sup> Kamboja terlibat konflik perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Laos, Vietnam, dan Thailand. Tidak heran konflik perbatasan selalu muncul di kawasan Indochina, karena

<sup>44</sup> Nazaruddin Nasution, dkk, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>45</sup> Windy Afiyanti, *op.cit.*, hlm. 202.

negara-negara di kawasan tersebut selalu berebut pengaruh dan kekuasaan.<sup>46</sup> Konflik perbatasan itu yang memicu setiap negara adu kekuatan untuk mendapatkan hegemoni di kawasan Indochina.

Tahun 1978 konflik Kamboja-Vietnam mulai bergejolak. Pada bulan April lebih kurang seratus ribu tentara Vietnam berjaga di sepanjang perbatasan Kamboja.<sup>47</sup> Aksi itu dilakukan karena pada Januari 1977 Kamboja melintasi perbatasan Vietnam untuk melakukan serangan meskipun tanpa provokasi dari pihak Vietnam sebelumnya. Peristiwa itu memicu Vietnam untuk melakukan serangan balasan. Rezim Pol Pot tidak gentar dengan provokasi yang dilakukan oleh Vietnam. Pol Pot berencana berkunjung ke Cina untuk mendapatkan bantuan militer jika sewaktu-waktu akan terjadi perang antara Kamboja dan Vietnam. Hubungan Kamboja dengan Cina cukup harmonis pada saat itu karena mereka menganut ideologi yang sama tidak hanya itu Pol Pot banyak mengadopsi gaya pemerintahan yang dijalankan Mao Zedong.

Akhir tahun 1978 Vietnam melakukan invasi ke Kamboja.<sup>48</sup> Pertempuran antara kedua belah pihak pun tidak dapat terelakkan. Pasukan Kamboja berusaha menghalau pasukan Vietnam dengan segala upaya agar tidak masuk jauh ke daerah Kamboja. Pasukan Kamboja tidak dapat menahan pasukan Vietnam yang

<sup>46</sup> Swantoro, *Masalalu Selalu Aktual*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 12.

<sup>47</sup> David Chandler, *op.cit.*, hlm. 223.

<sup>48</sup> David Chandler, dkk, *op.cit.*, hlm. 485.

lebih kuat. Vietnam beranggapan invasi yang dilakukannya merupakan upaya pembebasan Kamboja dari rezim Pol Pot yang kejam dan brutal.

Vietnam yang lebih unggul dari segi pasukan maupun peralatan militer dengan mudah dapat menyingkirkan pasukan Khmer Merah yang menguasai Kamboja selama ini. Mengetahui pasukannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Pol Pot segera terbang ke Thailand dengan menggunakan helikopter untuk menyelamatkan diri.<sup>49</sup> Kepergian Pol Pot membuat pasukan tidak dapat mempertahankan pemerintahan dari gempuran pasukan Vietnam. Akhirnya pada tanggal 7 Januari 1979 Phnom Penh jatuh ke tangan Vietnam. Jatuhnya Phnom Penh menandai berakhirlah pemerintahan Pol Pot di Kamboja.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,